

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ahmad Sudiro, *Ganti Kerugian dalam Kecelakaan Pesawat Udara Studi Perbandingan AS – Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2011.
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Bambang Poernomo, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Boy Nurdin, *Filsafat Hukum (Tokoh – Tokoh Penting dan Intisari pemikiran)*, Jakarta : Litera Antar Nusa 2012.
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. (Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum,/ Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke IV di Jakarta ,1979). Bandung, : PT Alumni. 2012.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.1991.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Inonesia* , Jakarta: Balai Pustaka.1991.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2002
- D. Schaffmeister, *Hukum Pidana, diterjemahkan oleh J.E. sahetapy, Cet. Kedua*, Yogyakarta : Liberty. 2003.
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawal Pers. 2010.
- Ermanjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika. 2008.

- Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta : Penaku bekerja sama dengan Maharini Press. 2008.
- Hans kelsen , *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media. 2006.
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso. Kamus Pintar Bahasa Indonesia. Surabaya : Fajar Mulia. 1996.
- H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika. 2007.
- I Made Widnyana, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska. 2010
- Imam Soeharto, *Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional*, Jakarta: Erlangga. 1997.
- IGM. Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Progam Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka. 2000.
- Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2004.
- Keppres RI No 80 tahun 2003.
- Lamintang Samosir, *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.1983.
- Lawrence Meir Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation. 1975.
- L.H.C Hulsman, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Bandung: Mandar Maju. 2001
- Marwan effendi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan dan Isu – Isu Aktual Dalam Kejahatan Financial dan Korupsi*, Jakarta: Referensi. 2011.
- M. Syamsa Ardisasmita. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E – Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem*

- Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jakarta*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 23 Agustus 2006.
- M. Hamdan. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2000.
- Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- N.E.Algra,dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Jakarta: Binacipta. 1983
- Piping Effrianto. *Kiat – Kiat Terhindar dari Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta Selatan, PT.Prima Ufuk Semesta. 2015.
- Purnadi Purwacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung, : Alumni. 1997.
- Putusan. No: 30/Pid.Sus/TPK/2017/PN Jkt.Pst
- R. Soesilo. *Kitap Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea. 1993.
- Samsul Ramli & Fahruurazi. *Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta. 2014.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta : PT Grafindo Persada. 2014.
- Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, Jakarta: BPHN. 1982.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung,: Alumni, 1981
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Al Gumni 1981.
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1983.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan sejarah*, cet. VIII: Kanisius. 1995.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.
- Wahyu Kurniawan. *Pengaturan Prinsip Fiduciary sebagai Landasan Kedudukan, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas: Kajian*

Perbandingan Indonesia dan Australia, disertasi program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2009

W.J.S Poerwardarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.1976.

Yesmin Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: PT. GramediaWidiasarana Indonesia. 2008.

2. PERATURAN

1. Undang – Undang RI Nomor. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009'
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. KUHP Pasal 55, 65 dan 423;
5. INPRES RI Nomor 05 Tahun 2004
6. KEPPRES RI Nomor. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

3. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan. No: 30/Pid.Sus/TPK/2017/PN Jkt.Pst

4. Internet

1. “ THE ROLE OF PHILOSOPHY IN ENHANCING THE QUALITY OF HUMAN RESOURCE IN INDONESIA,”
<http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/10071/9703>
<https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/mjss.2017.8.issue-5/mjss-2017-0035/mjss-2017-0035>. Diakses oleh DR. Boy Nurdin, September 2017
2. “ POSITIVISM AND THE INTERNAL POINT OF VIEW ”,
[https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1006149321037?](https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1006149321037?LI=true)
LI=true. Diakses oleh Richard Holton Professor of Philosophys, University of Cambridge. 1998.
3. <http://id.shvoong.com//law-and-politics/law/202708pengertiankorupsidantindakpidana/ixzzIaAXOjzOd>
4. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi>
5. <https://gurupkn.com/penyebab-terjadinya-tindakan-penyalahgunaan-kewenangan>
6. <http://ribazhambakung.com/bentuk-penyalahgunaan-wewenang-administrasi/>
7. <http://ram-lawoffice.com/index.php/blog/hukum/pidana/item/24-analisis-pasal-424-kuhp-dan-pasal-3-uu-31-tahun-1999-junto-uu-20-tahun-2001-tentang-tipikor>